

**RINGKASAN
OLEH
JULI SETIAWAN**

HUBUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Biro Perengkapan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan teknis administrasi, mengurus tertib administrasi serta pengelolaan barang daerah.

Dalam pengelolaan barang daerah amat diperlukan data-data yang benar, dan akurat agar seluruh data-data asset/inventaris yang dimiliki/dikuasai oleh Negara /daerah yang berada di Propinsi terjaga dengan baik, juga disamping itu asset yang dimiliki Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota semakin besar dan jumlahnya semakin banyak, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih handal untuk mengurus dan menanggung jawab seluruh asset. Namun demikian dalam pengelolaan asset tersebut Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dihadapkan pada berbagai masalah yang diantaranya belum adanya sistem Informasi yang mampu memberikan informasi pengelolaan barang daerah secara cepat, benar dan akurat.

Maka dari itu dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan barang daerah sebagaimana dliamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah dan Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, diperlukan suatu sistem yang handal yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

SIMBADA adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan Inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan format-format laporan standar yang telah dlbakukan serta mudah dilaksanakan. Dengan menerapkan SIMBADA maka diharapkan peningkatan kualitas data/Informasi untuk memperoleh jumlah dan jenis barang yang bertambah maupun berkurang bukan lagi merupakan faktor penghambat kinerja Pemerintah Daerah. Dengan ditambahnya jaringan yang on line di Biro Perlengkapan selaku pengelola barang daerah diharapkan dapat mampu untuk mengambil keputusan yang optimal terhadap pengelolaan barang daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.